

PDRB

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TIMUR MENURUT PENGELUARAN 2011 - 2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

JAWA TIMUR

MENURUT PENGELUARAN

2011 - 2015

<http://jatim.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
JAWA TIMUR
MENURUT PENGELUARAN 2011- 2015**

Nomor Publikasi : 3555.1603
Katalog BPS : 9302004.35

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : viii + 69 halaman

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

<http://jtim.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Surabaya, Juli 2016

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Provinsi Jawa Timur,

Teguh Pramono, M.A.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	2
1.2. Kegunaan Statistik PDRB	3
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	6
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	9
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	12
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	15
2.5 Perubahan Inventori	19
2.6 Ekspor dan Impor Barang serta Jasa	23
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN JAWA TIMUR BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN JAWA TIMUR TAHUN 2011-2015	25
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Jawa Timur Menurut Pengeluaran	26
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	30
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	34
3.4 Konsumsi Akhir Pemerintah	35
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	38
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	40

3.7	Perkembangan Ekspor	41
3.8	Perkembangan Impor	42
3.9	Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	44
BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2015	46
4.1	PDRB (Nominal)	47
4.2	Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	48
4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	49
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	50
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	50
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	51
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	52
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	53
4.9	Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	54
4.10	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	55
	PENUTUP	57
	LAMPIRAN	60
	DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015	26
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015	27
Tabel 3	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015	28
Tabel 4	Pertumbuhan Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015	29
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	29
Tabel 6	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	30
Tabel 7	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	32
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	33
Tabel 9	Perubahan Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	33
Tabel 10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	34
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	35
Tabel 12	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	37
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	39
Tabel 14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	40
Tabel 15	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	41

Tabel 16	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	43
Tabel 17	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	47
Tabel 18	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2011-2015	48
Tabel 19	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2011-2015	49
Tabel 20	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	50
Tabel 21	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2011-2015	51
Tabel 22	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 ..	51
Tabel 23	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	52
Tabel 24	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015	53
Tabel 25	Rasio Perdagangan Internasional, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	55
Tabel 26	Incremental Capital Output Ratio, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011-2015	28
----------	---	----

<http://jatim.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	61
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	62
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	63
Tabel 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	64
Tabel 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	65
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	66

<http://jatim.bps.go.id>

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17.

Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

- c. Menurut Pendekatan Pengeluaran,** PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II
METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<http://jatim.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Komponen konsumsi rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)

- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa

komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPR

i Pendahuluan

Komponen konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) muncul sebagai komponen tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Komponen ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

- \bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
- x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
- n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
 j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran

upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Komponen konsumsi pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)

- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

<p>PK-P adh Berlaku =</p> <p>Output non pasar – penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia</p>
--

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset

tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overall mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta

tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi

pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*reflate*”(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan

(*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).

- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;

- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6 EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan jaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI
JAWA TIMUR BERDASARKAN PDRB
PENGELUARAN JAWA TIMUR
2011 - 2015

<http://jatim.bps.go.id>

Perubahan struktur ekonomi Provinsi Jawa Timur akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2011 s.d 2015, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Jawa Timur digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut

3.1 TINJAUAN AGEGAT PDRB JAWA TIMUR MENURUT PENGELUARAN

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015

Komponen Pengeluaran	<i>(Miliar Rp)</i>				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	703.343,08	781.591,55	861.669,12	944.223,96	944.223,96
2. Konsumsi LNPRT	12.761,18	14.040,88	16.870,93	18.695,04	18.695,04
3. Konsumsi Pemerintah	70.530,91	86.194,97	93.990,03	97.679,53	97.679,53
4. PMTB	308.293,20	344.806,17	380.563,76	420.437,03	420.437,03
5. Perubahan Inventori	5.701,37	77,86	1.383,61	54.915,61	54.915,61
6. Ekspor Luar Negeri	191.339,93	212.739,29	228.013,85	244.080,63	244.080,63
7. Impor Luar Negeri	222.424,77	253.888,73	292.135,15	338.819,81	338.819,81
8. Net Ekspor Antar Daerah	51.032,27	63.205,31	92.078,71	99.484,54	99.484,54
Total PDRB	1.120.577,16	1.248.767,29	1.382.434,85	1.540.696,53	1.540.696,53

Perekonomian Jawa Timur selama tahun 2011-2015 menunjukkan tanda peningkatan. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011-2015**

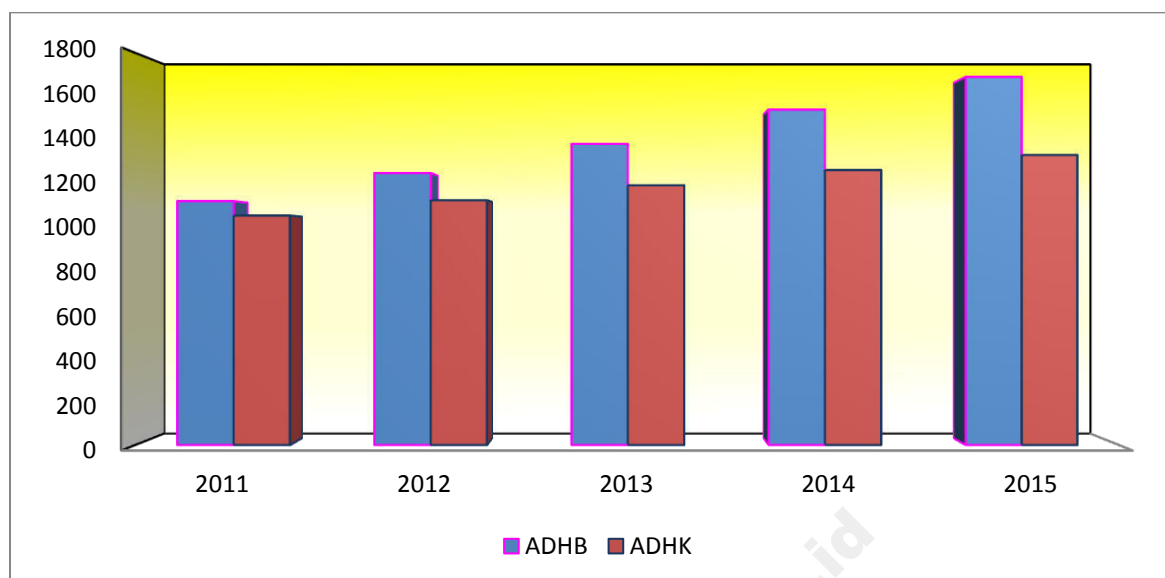
Komponen Pengeluaran	<i>(Miliar Rp)</i>				
	2011	2012	2013	2104	2105
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	657.924,96	693.946,69	739.533,93	786.369,55	812.762,13
2. Konsumsi LNPRT	10.333,52	10.808,46	11.980,87	13.574,97	13.275,66
3. Konsumsi Pemerintah	60.892,95	64.791,28	68.204,69	70.942,29	72.500,12
4. PMTB	289.641,72	314.921,95	330.280,83	344.715,56	364.481,01
5. Perubahan Inventori	10.040,04	71,18	1.232,04	36.268,13	29.884,49
6. Ekspor Luar Negeri	181.613,72	194.727,32	198.883,56	194.635,85	188.445,61
7. Impor Luar Negeri	207.016,45	222.000,10	236.351,95	255.715,78	231.443,39
8. Net Ekspor Antar Daerah	50.971,30	67.197,86	79.025,84	71.906,49	81.512,61
Total PDRB	1.054.401,77	1.124.464,64	1.192.789,80	1.262.697,06	1.331.418,24

Nilai PDRB Jawa Timur adh Berlaku selama periode tahun 2011 s.d 2015 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

PDRB menurut pengeluaran selain dinilai atas dasar harga Berlaku juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2011–2015, gambaran tentang perkembangan ekonomi Jawa Timur berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Dari grafik di bawah, pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga ditiadakan.

Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 - 2015



Terbentuknya total PDRB Pengeluaran merupakan kontribusi dari semua komponen-komponennya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor luar negeri, impor luar negeri dan net ekspor antar daerah atau ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah.

Tabel 3. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	62,77	62,59	62,71	62,05	60,62
2. Konsumsi LNPRT	1,14	1,12	1,22	1,21	1,18
3. Konsumsi Pemerintah	6,29	6,90	6,74	6,37	6,52
4. PMTB	27,51	27,61	27,53	27,30	27,51
5. Perubahan Inventori	0,51	0,01	0,10	3,57	2,53
6. Ekspor Luar Negeri	17,08	17,04	16,49	15,85	14,48
7. Impor Luar Negeri	19,85	20,33	21,11	22,00	18,76
8. Net Ekspor Antar Daerah	4,55	5,06	6,32	5,65	5,91
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran,
Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,49	5,48	6,57	6,33	3,36
2. Konsumsi LNPRT	1,65	4,60	10,85	13,31	-2,20
3. Konsumsi Pemerintah	1,89	6,40	5,27	4,01	2,20
4. PMTB	6,11	8,73	4,88	4,37	5,73
5. Perubahan Inventori	-53,98	-99,29	1.630,94	2.843,75	-17,60
6. Ekspor Luar Negeri	27,27	7,22	2,13	-2,14	-3,18
7. Impor Luar Negeri	23,43	7,24	6,46	8,19	-9,49
8. Net Ekspor Antar Daerah	138,97	31,83	17,60	-9,01	13,36
Total PDRB	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44

Pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dari tahun 2011 s.d 2015 secara rata-rata mencapai 6,13 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,44 persen (2011); 6,64 persen (2012); 6,08 persen (2013); 5,86 persen (2014) dan 5,44 persen (2015). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2015.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 - 2015**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	106,90	112,63	117,22	121,50	126,04
2. Konsumsi LNPRT	123,49	129,91	140,82	137,72	150,60
3. Konsumsi Pemerintah	115,83	133,03	136,70	138,19	152,00
4. PMTB	106,44	109,49	115,22	121,97	127,56
5. Ekspor	105,36	109,25	114,65	125,40	129,89
6. Impor	107,44	114,36	123,46	132,50	136,98
7. Net Ekspor	100,12	94,06	110,49	121,00	122,47
Total PDRB	106,28	111,05	115,90	121,94	126,92

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB secara umum menggambarkan tingkat perubahan harga yang semakin meningkat pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri). Namun sebaliknya untuk komponen net ekspor pada tahun 2012 menunjukkan tingkat perubahan harga yang menurun.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Secara struktur, konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menggambarkan, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	703.343,08	781.591,55	866.916,17	955.444,35	1.024.396,61
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	657.924,96	693.946,69	739.533,93	786.369,55	812.762,13
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	62,77	62,59	62,71	62,05	60,62
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	66.630,09	74.062,16	81.119,08	89.372,85	95.391,28
b. ADHK 2010	62.327,47	65.757,10	69.199,67	73.557,49	75.683,98
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	18.586,97	20.510,67	22.597,60	24.745,90	26.369,65
b. ADHK 2010	17.386,72	18.210,67	19.277,17	20.366,89	20.921,83
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi RT	4,49	5,48	6,57	6,33	3,36
b. Per-RT	3,77	5,50	5,24	6,30	2,89
c. Perkapita	3,73	4,74	5,86	5,65	2,72
Jumlah RT (<i>unit</i>)	10.555.938	10.553.183	10.686.958	10.690.544	10.738.892
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	37.840,7	38.106,6	38.363,2	38.610,2	38.847,6

Dalam kurun waktu 2011 - 2015 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal maupun riil, kondisi tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk

¹ Indeks perkembangan

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2011 s.d 2015 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 62,77 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 60,62 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Pada tahun 2011, secara umum setiap rumah tangga di Jawa Timur menghabiskan dana sekitar 66.630,09 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 74.062,16 ribu rupiah (2012); 81.119,08 ribu rupiah (2013); 89.372,85 ribu rupiah (2014); dan 95.391,28 ribu rupiah (2015).

Pada perkiraan *adh Konstan 2010*, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 3 sampai 6 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,30 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Jawa Timur meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 2,72 s.d 5,86 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga *adh Konstan* meningkat dari 4,49 persen ditahun 2011 menjadi sebesar 5,48 persen (2012) dan 6,57 persen (2013). Namun pada tahun-tahun berikutnya menurun menjadi 6,33 persen (2014) dan 3,36 persen (2015). Sementara itu, pertumbuhan konsumsi per-kapita selaras dengan *adh*

Konstan dimana meningkat dari 3,73 persen pada tahun 2011 menjadi sebesar 4,74 persen pada tahun 2012 dan 5,86 tahun 2013. Pada tahun 2014 dan 2015 pertumbuhan konsumsi per-kapita turun menjadi 5,65 persen dan 2,72 persen. Peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 – 2015³

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	35,10	35,18	34,28	32,76	32,56
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,06	4,09	3,93	3,82	3,76
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	11,06	11,03	11,13	10,94	10,86
d. Kesehatan dan Pendidikan	6,86	7,22	7,13	6,86	7,30
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	22,95	22,22	22,84	24,36	24,30
f. Hotel dan Restoran	14,83	15,22	15,71	16,13	16,29
g. Lainnya	5,15	5,02	4,98	5,13	4,92
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Rata-rata dari tahun 2011 s.d 2015, proporsi pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga di Jawa Timur, untuk konsumsi bukan makanan jauh lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama, masing-masing tahun mencapai 35,10 persen (2011) ; 35,18 persen (2012) ; 34,28 persen (2013) ; 32,76 persen (2014) ; dan 32,56 persen (2015). Sementara proporsi pengeluaran bukan makanan menunjukkan bahwa konsumsi tertinggi adalah subkomponen transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya yang berada pada kisaran 22 sampai 24 persen dari total konsumsi akhir rumah tangga.

Pola konsumsi di atas, memperlihatkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas konsumsi makanan dan bukan makanan yang masih cukup kuat. Namun, pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan menjadi semakin lebih penting sebagai dampak dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi,

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 – 2015

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,84	3,64	4,53	3,57	2,37
b. Pakaian dan Alas Kaki	8,22	4,03	5,36	6,13	4,50
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	5,36	6,65	8,88	3,49	4,18
d. Kesehatan dan Pendidikan	8,89	9,69	5,26	4,41	5,04
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,58	6,34	8,62	11,25	4,62
f. Hotel dan Restoran	4,57	5,62	7,21	7,47	2,77
g. Lainnya	12,49	6,53	6,34	6,90	0,27

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dengan masing-masing sebesar 5,95 persen (2011) ; 6,44 persen (2012) ; 7,62 persen (2013) ; 7,72 persen (2014), namun pada tahun 2015 turun menjadi 3,83 persen. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga terutama dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini mengindikasikan adanya peningkatan kemakmuran masyarakat, walaupun kemungkinan hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Perubahan Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 – 2015⁴

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,41	7,49	3,40	1,70	4,08
b. Pakaian dan Alas Kaki	8,62	7,60	1,08	1,00	0,87
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	4,45	3,97	2,73	4,74	2,16
d. Kesehatan dan Pendidikan	11,58	6,71	3,96	1,55	8,65
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,77	1,18	4,96	5,66	2,26
f. Hotel dan Restoran	8,51	8,00	6,80	5,29	5,37
g. Lainnya	4,71	1,80	3,45	6,03	2,73

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Tingkat perubahan harga setiap kelompok komoditi secara implisit disajikan dalam tabel 9. Selama periode 2011 – 2015 peningkatan harga (inflasi) relatif stabil. Sedangkan peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 8,41 persen (2011) ; 7,49 persen (2012) ; 3,40 persen (2013) ; 1,70 persen (2014) ; dan 4,08 persen (2015). Sementara itu, konsumsi bukan makanan dari 6,10 persen (2011) menjadi 4,26 persen (2012). Kemudian pada tahun berikutnya sebesar 4,49 persen (2013), 4,68 persen (2014) dan 3,58 persen (2015).

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan lembaga-lembaga pada kelompok LNPRT dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi.

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	12.761,18	14.040,88	16.870,93	18.695,04	19.993,12
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	10.333,52	10.808,46	11.980,87	13.574,97	13.275,66
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,14	1,12	1,22	1,21	1,18

Selama kurun waktu 2011–2015 konsumsi LNPRT baik secara adh Berlaku maupun adh Konstan 2010 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 konsumsi LNPRT adh Berlaku sebesar 12.761,18 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi 14.040,88 miliar rupiah (2012), 16.870,93 miliar rupiah (2013), 18.695,04 miliar rupiah (2014) dan 19.993,12 miliar rupiah (2015). Sedangkan konsumsi LNPRT adh Konstan sebesar 10.333,52 miliar rupiah pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 13.275,66 miliar rupiah pada tahun 2015. Walaupun secara nominal nilai konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) mengalami peningkatan selama periode 2011 – 2015, namun kontribusinya dalam pembentukan produk domestik regional bruto hanya pada kisaran 1 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah ditambah pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian provinsi Jawa Timur serta bagaimana perkembangannya dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	70.530,91	86.194,97	93.232,47	98.037,13	110.198,84
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	60.892,95	64.791,28	68.204,69	70.942,29	72.500,12
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	6,29	6,90	6,74	6,37	6,52
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	1.863,89	2.261,94	2.430,26	2.539,15	2.836,70
b. ADHK 2010	1.609,19	1.700,26	1.777,87	1.837,40	1.866,27
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	154.012,41	171.739,74	190.551,91	203.031,75	236.460,94
b. ADHK 2010	132.966,82	129.093,81	139.399,21	146.919,20	155.568,31
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	1,89	6,40	5,27	4,01	2,20
b. Konsumsi perkapita	1,15	5,66	4,56	3,35	1,57
c. Konsumsi per-pegawai	1,02	-2,91	7,98	5,39	5,89
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁶	457.956	501.893	489.276	482.866	466.034
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	37.840,7	38.106,6	38.363,2	38.610,2	38.847,6

Secara total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2011 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 70.530,91 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2015 nilainya mencapai 110.198,84 miliar rupiah. Demikian pula untuk konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)

⁶ Tidak termasuk polisi dan militer

Apabila dicermati lebih lanjut, proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan dari 6,29 persen ditahun 2011 hingga menjadi 6,52 persen pada tahun 2015. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2011; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2012 yang mencapai 6,90 persen. Peningkatan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2011 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 1.863,89 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan 2010 terjadi kenaikan setiap tahunnya (lihat tabel 11). Peningkatan tersebut menggambarkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 1,15 persen pada tahun 2011 meningkat menjadi 5,66 (2012) dan 4,56 (2013). Namun pada tahun 2014 dan 2015 turun menjadi sebesar 3,35 persen dan 1,57 persen.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah mempunyai kecenderungan naik. Pada tahun 2011 konsumsi per-pegawai pemerintah sebesar 154.012,41 ribu rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan (lihat tabel 11). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 7,98 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Kondisi ini sejalan dengan jumlah pegawai pemerintah yang juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah pegawai pemerintah berjumlah 457.956 orang dan meningkat menjadi 501.893 tahun 2012. Namun pada tahun 2013 dan 2014 jumlah pegawai mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 489.276 orang (2013) dan 482.866 orang (2014). Pada tahun 2015 jumlah pegawai

kembali menurun menjadi 466.034 orang. Dalam kurun waktu 2011 - 2015, secara total terjadi penambahan jumlah pegawai pemerintah sebanyak 8.076 orang atau naik sebesar 1,76 persen dari tahun 2011. Kenaikan tersebut di antaranya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pegawai pada banyak unit pemerintah.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan 2013, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 6,40 persen dan 5,27 persen; untuk konsumsi per-kapita 5,66 persen dan 4,56 persen; sedangkan untuk konsumsi per-pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2015 yaitu 7,98 persen dan 5,89 persen.

Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah ⁷					
a. Konsumsi Kolektif (Miliar Rp)	37.968,76	44.243,07	47.541,38	50.650,60	57.117,85
(%)	53,83	51,33	50,99	51,66	51,83
b. Konsumsi Individu (Miliar Rp)	32.562,15	41.951,90	45.691,09	47.386,53	53.080,98
(%)	46,17	48,67	49,01	48,34	48,17
Total Konsumsi (Miliar Rp)	70.530,91	86.194,97	93.232,47	98.037,13	110.198,84
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan riil (ADHK2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	2,91	8,19	5,73	5,97	-0,35
b. Konsumsi Individu	0,69	4,26	4,70	1,56	5,54
Total Konsumsi	1,89	6,40	5,27	4,01	2,20
Pertumbuhan indeks harga (%) implisit ⁸					
a. Konsumsi Kolektif	14,39	7,70	1,63	0,54	13,17
b. Konsumsi Individu	17,56	23,57	4,03	2,12	6,14
Total Konsumsi	15,83	14,86	2,75	1,10	9,99

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Sekitar lebih dari 50 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 12). Namun proporsinya terhadap total

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁸ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

konsumsi akhir pemerintah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 proporsinya mencapai 53,83 persen dan pada tahun 2012 dan 2013 turun menjadi 51,33 persen dan 50,99 persen. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 51,66 persen dan meningkat kembali di tahun 2015 menjadi 51,83 persen.

Konsumsi individu secara nominal mengalami peningkatan dari tahun ketahun (lihat tabel 12). Secara umum, proporsi konsumsi individu pada periode 2011-2015 juga cenderung meningkat. Pada tahun 2011 konsumsi individu proporsinya sebesar 46,17 persen dan meningkat hingga sebesar 48,17 persen pada tahun 2015.

Hal lain yang layak untuk dicermati adalah rasio perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah dengan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah mengalami peningkatan dari yang sebesar 457.956 orang (2011) menjadi 466.034 orang (2015). Begitu juga jumlah penduduk meningkat dari sejumlah 37.840,7 ribu orang pada tahun 2011 menjadi 38.847,6 ribu orang pada tahun 2015. Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut cenderung menurun dengan masing-masing adalah 82,63 (2011), 75,93 (2012), 78,41 (2013), 79,96 (2014), dan 83,36 (2015). Hal ini berarti pada tahun 2015 setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 83 penduduk.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2011 - 2015 (tabel 13). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas

⁹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB. Proporsi sub komponen bangunan terhadap total PMTB relatif stabil sekitar 78 persen selama periode tahun 2011 – 2015.

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 – 2015**

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	308.293,20	344.806,17	380.563,76	420.437,03	464.938,79
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	289.641,72	314.921,95	330.280,83	344.715,56	364.481,01
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	27,51	27,61	27,53	27,30	27,51
Struktur PMTB ¹⁰					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	241.027,81	269.488,62	297.330,73	330.714,16	365.836,18
(%)	(78,18)	(78,16)	(78,13)	(78,66)	(78,68)
b. Non Bangunan (<i>Mil Rp</i>)	67.265,39	75.317,56	83.233,02	89.722,87	99.102,60
(%)	(21,82)	(21,84)	(21,87)	(21,34)	(21,32)
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	308.293,20	344.806,17	380.563,76	420.437,03	464.938,79
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan ¹¹ (%)					
a. Bangunan	2,87	8,55	6,09	4,61	6,03
b. Non Bangunan	18,32	9,31	0,92	3,54	4,71
Total PMTB	6,11	8,73	4,88	4,37	5,73

Jika dilihat pertumbuhannya, pada masing-masing sub komponen PMTB mempunyai pertumbuhan yang sangat bervariasi antar tahunnya. Pertumbuhan sub komponen bangunan menunjukkan pola yang variatif antar tahunnya. Pada tahun 2011 sub komponen bangunan tumbuh sebesar 2,87 persen kemudian meningkat menjadi 8,55 persen (2012). Namun pada tahun 2013 dan 2014 melambat hingga pertumbuhannya hanya mencapai 6,09 persen dan 4,61 persen. Tahun 2015 pertumbuhan sub komponen bangunan meningkat menjadi 6,03 persen. Sedangkan untuk Non Bangunan mengalami pertumbuhan fluktuatif dari 18,32 persen tahun 2011 menjadi 9,31 persen (2012) dan 0,92 persen (2013). Kemudian meningkat kembali menjadi 3,54 persen (2014) dan 4,71 persen (2015).

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Secara umum, pertumbuhan komponen PMTB mengalami fluktuasi di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai besaran angka 8,73 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu hanya sebesar 4,37 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	5.701,37	77,86	1.383,61	54.915,61	42.796,11
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	10.040,04	71,18	1.232,04	36.268,13	29.884,49
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,51	0,01	0,10	3,57	2,53

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2011 perubahan inventori sebesar 5.701,37 miliar rupiah, kemudian tahun 2012 perubahan inventori nilainya sebesar 77,86 miliar rupiah. Perubahan inventori pada tahun 2013 sebesar 1.383,61 miliar rupiah dan pada tahun berikutnya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 54.915,61 miliar rupiah (2014) dan 42.796,11 miliar rupiah (2015).

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Transaksi ekspor dalam struktur permintaan akhir menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

**Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 - 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	191.339,93	212.739,29	228.013,85	244.080,63	244.763,47
b. ADHK 2000 (<i>Miliar Rp</i>)	181.613,72	194.727,32	198.883,56	194.635,85	188.445,61
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	17,08	17,04	16,49	15,85	14,48
Struktur Ekspor ¹²					
a. Barang (<i>Mil Rp</i>)	183.906,63	203.860,66	217.891,54	233.056,90	234.157,73
(%)	96,12	95,83	95,56	95,48	95,67
b. Jasa (<i>Mil Rp</i>)	7.433,30	8.878,63	10.122,31	11.023,73	10.605,74
(%)	3,88	4,17	4,44	4,52	4,33
Total ekspor (%)	191.339,93	212.739,29	228.013,85	244.080,63	244.763,47
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pertumbuhan ¹³					
- Barang	28,13	7,00	2,13	-2,09	-3,05
- Jasa	9,57	12,43	2,21	-3,16	-6,27
Total ekspor	27,27	7,22	2,13	-2,14	-3,18

Nilai ekspor tahun 2011-2015 secara total menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 nilai ekspor sebesar 191.339,93 miliar rupiah dan tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 212.739,29 miliar rupiah. Tahun 2013 ekspor meningkat lagi menjadi sebesar 228.013,85 miliar rupiah. Pada tahun berikutnya, nilai ekspor meningkat cukup signifikan sehingga menjadi sebesar 244.080,63 miliar rupiah (2014), dan pada tahun 2015 menjadi 244.763,47 miliar rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku,

¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)

nilai ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 181.613,72 miliar rupiah (2011); 194.727,32 miliar rupiah (2012); 198.883,56 miliar rupiah (2013); 194.635,85 miliar rupiah (2014); dan turun menjadi sebesar 188.445,61 miliar rupiah (2015). Hal ini juga sejalan dengan proporsinya dalam PDRB selama kurun waktu 2011 – 2015 yaitu dari 17,08 persen pada tahun 2011 menjadi 17,04 persen di tahun 2012. Pada tahun 2013 proporsinya menjadi 16,49 persen, tahun 2014 dan 2015 turun menjadi 15,74 persen dan 14,48 persen.

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor Jawa Timur berupa barang (rata-rata diatas 90 persen), sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Sedangkan pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang sangat tinggi, khususnya pada tahun 2011 yang mencapai 27,27 persen. Pertumbuhan tersebut lebih disebabkan adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 ekspor barang tumbuh sebesar 7,22 persen dan 2,13 persen. Sementara itu pada tahun 2014 dan 2015 ekspor barang mengalami kontraksi sebesar 2,14 persen dan 3,18 persen. Pertumbuhan minus tersebut tidak hanya terjadi pada ekspor barang saja namun juga pada ekspor jasa, yaitu masing-masing minus 2,09 persen dan minus 3,16 persen pada tahun 2014. Sedang pada tahun 2015 ekspor barang kontraksi sebesar 3,05 persen dan ekspor jasa sebesar 6,27 persen. Diduga kondisi ini akibat adanya penurunan permintaan barang dari luar negeri di tahun tersebut.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPR, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Jawa Timur. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen.

Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Jawa Timur terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Jawa Timur di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	222.424,77	253.888,73	291.795,84	338.819,81	317.036,12
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	207.016,45	222.000,10	236.351,95	255.715,78	231.443,39
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	19,85	20,33	21,11	22,00	18,76
Struktur Impor ¹⁴					
a. Barang (<i>Mil Rp</i>)	206.666,73	235.930,23	269.622,60	308.899,15	295.186,83
(%)	92,92	92,93	92,40	91,17	93,11
b. Jasa (<i>Mil Rp</i>)	15.758,04	17.958,50	22.173,24	29.920,66	21.849,29
(%)	7,08	7,07	7,60	8,83	6,89
Total impor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁵					
- Barang	25,88	7,52	6,29	7,47	-7,86
- Jasa	-0,01	3,84	8,64	17,09	-27,83
Total impor	23,43	7,24	6,46	8,19	-9,49

Tabel 16 di atas menunjukkan pola perkembangan impor Jawa Timur pada periode tahun 2011 s.d 2015 yang cenderung meningkat (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Pada tahun 2012 nilai impor mengalami peningkatan dimana nilainya mencapai 253.888,73 miliar rupiah dibanding tahun 2011 yang hanya sebesar 222.424,77 miliar rupiah. Pada tahun-tahun berikutnya nilai impor terus mengalami peningkatan

¹⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)

hingga mencapai 338.819,81 miliar rupiah pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 nilai impor mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 317.036,12 miliar rupiah.

Proporsi impor LN selama periode 2011 - 2015 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 proporsi impor LN terhadap PDRB sebesar 19,85 persen dan terus meningkat menjadi sebesar 22,00 persen pada tahun 2014. Sementara pada tahun 2015 proporsi impor LN turun menjadi 18,76 persen.

Secara riil nilai impor mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2011 yakni sebesar 23,43 persen. Namun, pada tahun 2012 pertumbuhan impor cenderung melambat yang hanya menyentuh dikisaran 7,24 persen. Perlambatan juga terjadi di tahun 2013 dengan pertumbuhan sebesar 6,46 persen. Kemudian pada tahun 2014 pertumbuhan impor LN menggeliat lagi hingga mencapai 8,19 persen. Pada tahun 2015 pertumbuhan impor LN mengalami kontraksi sebesar 9,49 persen. Hal yang sama juga terjadi pada pertumbuhan impor barang, pada tahun 2011 impor barang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 25,88 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,29 persen dan pada tahun 2015 mengalami kontraksi sebesar 7,86 persen.

Dilihat komposisinya, sebagian besar produk impor berbentuk barang yang memiliki proporsi sekitar 92-93 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa. Selama periode 2011 - 2015, impor LN dalam bentuk barang cenderung mengalami peningkatan. Namun impor LN jasa mempunyai pola struktur yang agak berbeda dengan impor barang, yaitu cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 porsi impor jasa hanya sebesar 7,08 persen, dan pada tahun 2015 menurun menjadi 6,89 persen.

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini

(dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "**positif**" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output "bayangan". Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
MENURUT PENGELUARAN JAWA TIMUR
2011 - 2015

<http://jatim.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita

**Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 – 2015**

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	1.120.577,16	1.248.767,29	1.382.501,50	1.539.794,70	1.689.882,40
- ADHK 2010	1.054.401,77	1.124.464,64	1.192.789,80	1.262.697,06	1.331.418,24
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	29.613,05	32.770,38	36.037,18	39.880,51	43.500,35
- ADHK 2010	27.864,26	29.508,40	31.092,04	32.703,72	34.272,89
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010	5,66	5,90	5,37	5,18	4,80
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)					
Pertumbuhan	0,73	0,70	0,67	0,64	0,61

Tabel 17 menunjukkan peningkatan PDRB per-kapita Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu

menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 4-5 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 0,6 - 0,7 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Jawa Timur (sekitar 60 persen), artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Jawa Timur sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	703.343,08	781.591,55	866.916,17	955.444,35	1.024.396,61
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	440.931,61	514.227,42	569.273,53	647.476,33	696.968,22
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,60	1,52	1,52	1,48	1,47

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebanyak 1,60 kali dari yang diekspor. Ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Selama periode 2011 - 2015, rasio perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap ekspor menunjukkan kecenderungan menurun. Secara implisit

data tersebut menjelaskan, walaupun nilai konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor semakin meningkat namun peningkatan nilai ekspor jauh lebih cepat. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, penurunan rasio tersebut juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan ekspor yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	703.343,08	781.591,55	866.916,17	955.444,35	1.024.396,61
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	308.293,20	344.806,17	380.563,76	420.437,03	464.938,79
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2,28	2,27	2,28	2,27	2,20

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun, dari sebesar 2,28 pada tahun 2011 menjadi 2,27 pada tahun 2012. Pada tahun 2013 rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB naik menjadi 2,28. Sementara tahun-tahun berikutnya rasionya terus mengalami penurunan menjadi 2,27 (2014) dan 2,20 (2015). Hal ini terjadi karena nilai investasi cenderung melambat, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 20. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)					
(Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	703.343,08	781.591,55	866.916,17	955.444,35	1.024.396,61
b. LNPRT	12.761,18	14.040,88	16.870,93	18.695,04	19.993,12
c. Pemerintah	70.530,91	86.194,97	93.232,47	98.037,13	110.198,84
Jumlah	786.635,17	881.827,40	977.019,57	1.072.176,51	1.154.588,57
PDRB (ADHB)					
(Miliar Rp)	1.120.577,16	1.248.767,29	1.382.501,50	1.539.794,70	1.689.882,40
Proporsi	70,20	70,62	70,67	69,63	68,32

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 60 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan modal (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang modal. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi modal (PMTB).

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2011 – 2015

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	440.931,61	514.227,42	569.273,53	647.476,33	696.968,22
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	308.293,20	344.806,17	380.563,76	420.437,03	464.938,79
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,43	1,49	1,50	1,54	1,50

Selama tahun 2011-2015, ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB dan rasio ekspor terhadap PMTB juga mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun (tabel 21). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Peningkatan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan PMTB.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor
Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015**

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1.120.577,16	1.248.767,29	1.382.501,50	1.539.794,70	1.689.882,40
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	420.984,18	492.171,56	545.738,97	655.210,78	669.409,28
Rasio PDRB terhadap Impor	2,66	2,54	2,53	2,35	2,52

Tabel 22 menunjukkan rasio PDRB terhadap impor selama tahun 2011 - 2015 cenderung menurun dari sebesar 2,66 pada tahun 2011 menjadi 2,54 pada tahun 2012. Pada tahun berikutnya rasionya terus mengalami penurunan menjadi 2,53 (2013), 2,35 (2014), dan 2,52 (2015). Penurunan rasio menunjukkan ketergantungan PDRB terhadap produk impor yang semakin meningkat.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u>					
PDRB (ADHB)					
(Miliar Rp)	1.120.577,16	1.248.767,29	1.382.501,50	1.539.794,70	1.689.882,40
%	(72,69)	(71,73)	(71,70)	(70,15)	(71,63)
Total nilai Impor ADHB					
(Miliar Rp)	420.984,18	492.171,56	545.738,97	655.210,78	669.409,28
%	(27,31)	(28,27)	(28,30)	(29,85)	(28,37)
<u>Total Permintaan Akhir¹⁶</u>					
(Miliar Rp)	1.541.561,34	1.740.938,85	1.928.240,47	2.195.005,48	2.359.291,68
%	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan luar daerah, dengan rentang 27 s.d 29 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 70 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 1.541.561,34 miliar (2011) menjadi sebesar 2.359.291,68 miliar rupiah (2015).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 1.120.577,16 miliar rupiah (2011); 1.248.767,29 miliar rupiah (2012); 1.382.501,50 miliar rupiah (2013); 1.539.794,70 miliar rupiah (2014);

¹⁶ Termasuk diskrepansi statistik

dan 1.689.882,40 miliar rupiah (2015). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 420.984,18 miliar rupiah (2011); 492.171,56 miliar rupiah (2012); 545.738,97 miliar rupiah (2013); 655.210,78 miliar rupiah (2014) ; dan 669.409,28 miliar rupiah (2015).

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	440.931,61	514.227,42	569.273,53	647.476,33	696.968,22
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	420.984,18	492.171,56	545.738,97	655.210,78	669.409,28
Net ekspor (X - M) (Miliar Rp)	19.947,42	22.055,86	23.534,56	-7.734,45	27.558,94
Rasio ekspor thdp Impor	1,05	1,04	1,04	0,99	1,04

Selama periode 2011 - 2015, posisi perdagangan barang dan jasa provinsi Jawa Timur dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai positif, kecuali pada tahun 2014 yang mempunyai nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi Jawa Timur cenderung dalam posisi surplus. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai "**tabungan luar negeri**". Pada tahun 2014 posisi perdagangan barang dan jasa mengalami defisit dimana nilai impor lebih besar daripada ekspor yaitu minus 7.734,45 miliar rupiah. Di sisi lain, surplus perdagangan Provinsi Jawa Timur yang terjadi antara tahun 2011 sampai dengan 2013 dan tahun 2015 tercatat masing-masing sebesar 19.947,42 miliar rupiah (2011), 22.055,86 miliar rupiah (2012), 23.534,56 miliar rupiah (2013) dan 27.558,94 miliar rupiah (2015).

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2011-2015. Pada tahun 2011 rasionya sebesar 1,05; menurun menjadi 1,04 pada tahun 2012 dan 2013, kemudian berbalik arah menjadi sekitar 0,99 pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 sebesar 1,04.

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d + 1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Data pada tabel 25 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2011-2015 posisi ekspor lebih rendah dari impor. Kecenderungan nilai ekspor pada periode tersebut terus meningkat dari 191.339,93 miliar rupiah pada tahun 2011 menjadi 244.763,47 miliar rupiah pada tahun 2015. Begitu pula dengan kecenderungan impor, yang mempunyai pola hampir sama dengan ekspor, cenderung meningkat setiap tahun.

**Tabel 25. Rasio Perdagangan Internasional,
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 - 2015**

U r a i a n	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	191.339,93	212.739,29	228.013,85	244.080,63	244.763,47
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	222.424,77	253.888,73	291.795,84	338.819,81	317.036,12
(X - M) (Miliar Rp)	-31.084,84	-41.149,45	-63.791,99	-94.739,18	-72.272,65
(X +M) (Miliar Rp)	413.764,70	466.628,02	519.809,69	582.900,43	561.799,58
R P I	-0,08	-0,09	-0,12	-0,16	-0,13

Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Jawa Timur selama tahun 2011-2015 rasio perdagangan internasionalnya didominasi oleh impor karena rasio yang menunjukkan tanda minus.

4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 26. Incremental Capital Output Ratio,
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2011 - 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010)					
(miliar rupiah)	1.054.401,77	1.124.464,64	1.192.789,80	1.262.697,06	1.331.418,24
Perubahan					
(miliar rupiah)	63.752,93	70.062,87	68.325,16	69.907,26	68.721,18
PMTB (ADHK 2010)					
(miliar Rp)	289.641,72	314.921,95	330.280,83	344.715,56	364.481,01
ICOR	4,54	4,49	4,83	4,93	5,30

Data di atas menunjukkan besaran ICOR menurun dari sebesar 4,54 (2011) menjadi 4,49 (2012). Pada tahun 2013 ICOR meningkat menjadi 4,83 dan terus meningkat pada tahun 2014 dan 2015 menjadi 4,93 dan 5,30.

BAB V
PENUTUP

<http://jatim.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2011 s.d 2015 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Jawa Timur pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2011 s.d 2015, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current*

transfer) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Jawa Timur terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

<http://jatim.bps.go.id>

<http://jatim.bps.go.id>

LAMPIRAN

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Timur**

(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2011*	2012*	2013*	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	703,343.08	781,591.55	866,916.17	955,444.35	1,024,396.61
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	246,855.35	275,002.20	297,210.13	313,041.22	333,544.45
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	28,583.04	31,995.01	34,072.99	36,523.01	38,498.33
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	77,767.19	86,234.65	96,452.54	104,558.75	111,284.95
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	48,245.48	56,469.80	61,794.83	65,524.70	74,777.48
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	161,391.34	173,657.65	197,984.01	232,711.94	248,962.95
1.f. Hotel dan Restoran	104,285.29	118,958.48	136,197.23	154,115.59	166,887.87
1.g. Lainnya	36,215.41	39,273.75	43,204.45	48,969.14	50,440.59
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	12,761.18	14,040.88	16,870.93	18,695.04	19,993.12
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	70,530.91	86,194.97	93,232.47	98,037.13	110,198.84
3.a. Konsumsi Kolektif	37,968.76	44,243.07	47,541.38	50,650.60	57,117.85
3.b. Konsumsi Individu	32,562.15	41,951.90	45,691.09	47,386.53	53,080.98
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	308,293.20	344,806.17	380,563.76	420,437.03	464,938.79
4.a. Bangunan	241,027.81	269,488.62	297,330.73	330,714.16	365,836.18
4.b. Non-Bangunan	67,265.39	75,317.56	83,233.02	89,722.87	99,102.60
5. Perubahan Inventori	5,701.37	77.86	1,383.61	54,915.61	42,796.11
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	191,339.93	212,739.29	228,013.85	244,080.63	244,763.47
6.a. Barang	183,906.63	203,860.66	217,891.54	233,056.90	234,157.73
6.b. Jasa	7,433.30	8,878.63	10,122.31	11,023.73	10,605.74
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	222,424.77	253,888.73	291,795.84	338,819.81	317,036.12
7.a. Barang	206,666.73	235,930.23	269,622.60	308,899.15	295,186.83
7.b. Jasa	15,758.04	17,958.50	22,173.24	29,920.66	21,849.29
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	51,032.27	63,205.31	87,316.55	87,004.73	99,831.59
8.a. Ekspor	249,591.68	301,488.13	341,259.68	403,395.70	452,204.76
8.b. Impor	198,559.41	238,282.82	253,943.13	316,390.97	352,373.16
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1,120,577.16	1,248,767.29	1,382,501.50	1,539,794.70	1,689,882.40

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Timur**

(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2011*	2012*	2013*	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	657,924.96	693,946.69	739,533.93	786,369.55	812,762.13
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	227,697.43	235,992.84	246,672.68	255,479.80	261,544.50
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	26,313.66	27,374.93	28,841.51	30,609.80	31,987.67
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	74,456.15	79,410.35	86,459.34	89,480.67	93,220.70
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	43,236.57	47,425.91	49,918.85	52,121.78	54,747.63
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	155,526.66	165,389.98	179,639.21	199,844.18	209,079.49
1.f. Hotel dan Restoran	96,108.31	101,507.84	108,822.49	116,950.60	120,187.46
1.g. Lainnya	34,586.18	36,844.84	39,179.84	41,882.72	41,994.66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,333.52	10,808.46	11,980.87	13,574.97	13,275.66
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	60,892.95	64,791.28	68,204.69	70,942.29	72,500.12
3.a. Konsumsi Kolektif	33,193.73	35,912.11	37,969.46	40,236.51	40,094.06
3.b. Konsumsi Individu	27,699.22	28,879.17	30,235.23	30,705.78	32,406.07
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	289,641.72	314,921.95	330,280.83	344,715.56	364,481.01
4.a. Bangunan	221,853.66	240,821.56	255,495.15	267,280.28	283,401.25
4.b. Non-Bangunan	67,788.06	74,100.39	74,785.67	77,435.28	81,079.76
5. Perubahan Inventori	10,040.04	71.18	1,232.04	36,268.13	29,884.49
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	181,613.72	194,727.32	198,883.56	194,635.85	188,445.61
6.a. Barang	174,378.52	186,592.91	190,568.99	186,583.96	180,898.41
6.b. Jasa	7,235.20	8,134.42	8,314.57	8,051.88	7,547.20
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	207,016.45	222,000.10	236,351.95	255,715.78	231,443.39
7.a. Barang	191,170.91	205,546.53	218,477.09	234,786.52	216,337.98
7.b. Jasa	15,845.54	16,453.57	17,874.86	20,929.25	15,105.41
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	50,971.30	67,197.86	79,025.84	71,906.49	81,512.61
8.a. Ekspor	238,974.12	288,131.95	317,098.11	359,835.66	390,629.59
8.b. Impor	188,002.82	220,934.09	238,072.28	287,929.16	309,116.99
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1,054,401.77	1,124,464.64	1,192,789.80	1,262,697.06	1,331,418.24

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Timur**

Komponen Pengeluaran	2011*	2012*	2013*	2014*	2015**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	62.77	62.59	62.71	62.05	60.62
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	22.03	22.02	21.50	20.33	19.74
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2.55	2.56	2.46	2.37	2.28
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6.94	6.91	6.98	6.79	6.59
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4.31	4.52	4.47	4.26	4.43
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	14.40	13.91	14.32	15.11	14.73
1.f. Hotel dan Restoran	9.31	9.53	9.85	10.01	9.88
1.g. Lainnya	3.23	3.15	3.13	3.18	2.98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.14	1.12	1.22	1.21	1.18
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	6.29	6.90	6.74	6.37	6.52
3.a. Konsumsi Kolektif	3.39	3.54	3.44	3.29	3.38
3.b. Konsumsi Individu	2.91	3.36	3.30	3.08	3.14
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	27.51	27.61	27.53	27.30	27.51
4.a. Bangunan	21.51	21.58	21.51	21.48	21.65
4.b. Non-Bangunan	6.00	6.03	6.02	5.83	5.86
5. Perubahan Inventori	0.51	0.01	0.10	3.57	2.53
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	17.08	17.04	16.49	15.85	14.48
6.a. Barang	16.41	16.32	15.76	15.14	13.86
6.b. Jasa	0.66	0.71	0.73	0.72	0.63
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	19.85	20.33	21.11	22.00	18.76
7.a. Barang	18.44	18.89	19.50	20.06	17.47
7.b. Jasa	1.41	1.44	1.60	1.94	1.29
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	4.55	5.06	6.32	5.65	5.91
8.a. Ekspor	22.27	24.14	24.68	26.20	26.76
8.b. Impor	17.72	19.08	18.37	20.55	20.85
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Timur**

Komponen Pengeluaran	2011*	2012*	2013*	2014*	2015**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4.49	5.48	6.57	6.33	3.36
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1.84	3.64	4.53	3.57	2.37
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	8.22	4.03	5.36	6.13	4.50
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5.36	6.65	8.88	3.49	4.18
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	8.89	9.69	5.26	4.41	5.04
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4.58	6.34	8.62	11.25	4.62
1.f. Hotel dan Restoran	4.57	5.62	7.21	7.47	2.77
1.g. Lainnya	12.49	6.53	6.34	6.90	0.27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.65	4.60	10.85	13.31	-2.20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	1.89	6.40	5.27	4.01	2.20
3.a. Konsumsi Kolektif	2.91	8.19	5.73	5.97	-0.35
3.b. Konsumsi Individu	0.69	4.26	4.70	1.56	5.54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	6.11	8.73	4.88	4.37	5.73
4.a. Bangunan	2.87	8.55	6.09	4.61	6.03
4.b. Non-Bangunan	18.32	9.31	0.92	3.54	4.71
5. Perubahan Inventori	-53.98	-99.29	1630.94	2843.75	-17.60
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	27.27	7.22	2.13	-2.14	-3.18
6.a. Barang	28.13	7.00	2.13	-2.09	-3.05
6.b. Jasa	9.57	12.43	2.21	-3.16	-6.27
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	23.43	7.24	6.46	8.19	-9.49
7.a. Barang	25.88	7.52	6.29	7.47	-7.86
7.b. Jasa	-0.01	3.84	8.64	17.09	-27.83
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	138.97	31.83	17.60	-9.01	13.36
8.a. Ekspor	16.15	20.57	10.05	13.48	8.56
8.b. Impor	1.94	17.52	7.76	20.94	7.36
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	6.44	6.64	6.08	5.86	5.44

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Timur**

Komponen Pengeluaran	2011*	2012*	2013*	2014*	2015**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	106.90	112.63	117.22	121.50	126.04
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	108.41	116.53	120.49	122.53	127.53
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	108.62	116.88	118.14	119.32	120.35
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	104.45	108.59	111.56	116.85	119.38
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	111.58	119.07	123.79	125.71	136.59
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	103.77	105.00	110.21	116.45	119.08
1.f. Hotel dan Restoran	108.51	117.19	125.16	131.78	138.86
1.g. Lainnya	104.71	106.59	110.27	116.92	120.11
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	123.49	129.91	140.82	137.72	150.60
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	115.83	133.03	136.70	138.19	152.00
3.a. Konsumsi Kolektif	114.39	123.20	125.21	125.88	142.46
3.b. Konsumsi Individu	117.56	145.27	151.12	154.32	163.80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	106.44	109.49	115.22	121.97	127.56
4.a. Bangunan	108.64	111.90	116.37	123.73	129.09
4.b. Non-Bangunan	99.23	101.64	111.30	115.87	122.23
5. Perubahan Inventori	56.79	109.39	112.30	151.42	143.21
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	105.36	109.25	114.65	125.40	129.89
6.a. Barang	105.46	109.25	114.34	124.91	129.44
6.b. Jasa	102.74	109.15	121.74	136.91	140.53
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	107.44	114.36	123.46	132.50	136.98
7.a. Barang	108.11	114.78	123.41	131.57	136.45
7.b. Jasa	99.45	109.15	124.05	142.96	144.65
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100.12	94.06	110.49	121.00	122.47
8.a. Ekspor	104.44	104.64	107.62	112.11	115.76
8.b. Impor	105.62	107.85	106.67	109.89	113.99
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	106.28	111.05	115.90	121.94	126.92

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Timur**

Komponen Pengeluaran	2011*	2012*	2013*	2014*	2015**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	6.90	5.36	4.08	3.65	3.74
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8.41	7.49	3.40	1.70	4.08
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	8.62	7.60	1.08	1.00	0.87
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4.45	3.97	2.73	4.74	2.16
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	11.58	6.71	3.96	1.55	8.65
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3.77	1.18	4.96	5.66	2.26
1.f. Hotel dan Restoran	8.51	8.00	6.80	5.29	5.37
1.g. Lainnya	4.71	1.80	3.45	6.03	2.73
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	23.49	5.19	8.40	-2.20	9.35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	15.83	14.86	2.75	1.10	9.99
3.a. Konsumsi Kolektif	14.39	7.70	1.63	0.54	13.17
3.b. Konsumsi Individu	17.56	23.57	4.03	2.12	6.14
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	6.44	2.87	5.24	5.85	4.59
4.a. Bangunan	8.64	3.00	3.99	6.32	4.33
4.b. Non-Bangunan	-0.77	2.43	9.50	4.11	5.49
5. Perubahan Inventori	-43.21	92.63	2.66	34.83	-5.42
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	5.36	3.70	4.94	9.38	3.57
6.a. Barang	5.46	3.59	4.65	9.24	3.63
6.b. Jasa	2.74	6.24	11.54	12.46	2.64
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	7.44	6.44	7.95	7.32	3.38
7.a. Barang	8.11	6.18	7.52	6.61	3.71
7.b. Jasa	-0.55	9.75	13.65	15.25	1.18
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	0.12	-6.05	17.47	9.51	1.22
8.a. Ekspor	4.44	0.18	2.85	4.17	3.26
8.b. Impor	5.62	2.12	-1.10	3.02	3.74
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	6.28	4.50	4.37	5.21	4.08

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

<http://jatim.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Jawa Timur Dalam Angka*, berbagai seri, Surabaya.
4. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Proyeksi Penduduk 2010 - 2035*, berbagai seri, Jakarta
6. _____, *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
7. _____, *Statistik Kesejahteraan Rakyat*, berbagai seri, Surabaya.
8. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
11. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
12. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
13. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
14. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
15. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
16. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.

17. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
18. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
19. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
20. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
21. _____, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts*, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
22. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
23. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
24. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
25. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292

Telp. (031) 8439343 Fax. (031) 8494007

E-mail : bps3500@bps.go.id

Homepage : <http://jatim.bps.go.id>